



Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura terhadap Peruntukan Lahan di Holtekamp Distrik Muara Tami

Jhon Ronaldo Naa^{1*}, Marsal Arung Lamba², Lazarus Ramandei³, Tommi Tommi⁴

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cenderawasih, Indonesia

²⁻⁴Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Alamat: Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

Korespondensi penulis: jhonronaldonaa@gmail.com *

Abstract. Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning indicates that the preparation of spatial planning plans must cover land space, sea space and air space, including space inside the earth, arranged in stages and ultimately the spatial planning plan is determined with their respective regional regulations. The method used in the research is the survey method. The type of research used is quantitative and descriptive qualitative research. Meanwhile, the quantitative approach results from the public's perception that the results of existing research show a variety of public attitudes and views towards government policies, ranging from full support to dissatisfaction. Based on the spatial plan on the Jayapura City Cultivation Area Plan Map for 2023-2033, there are 7 (seven) namely Convertible Forest Land, Protected Area, Livestock Land Area, Fishery Area, Limited Production Forest Area and Food Crop Area, from the results of a survey conducted by author at the research location there have been changes in the Convertible Forest land area as a result of development activities and the reduction in land area in the Cultivation Area which initially had an area of 523,847 Ha, has been reduced to 523,790 or 0.01%, where housing has a larger area, namely 13,665 Ha. And land changes have also occurred in the Limited Production Forest Area, which initially had an area of 430,048 Ha, has undergone changes and been reduced to 121,027 Ha or 14%, this is because there is agricultural land with an area of 19,409 Ha in the Limited Production Forest Land area experiencing changes. which is quite big.

Keywords: Implementation of Land Allocation, Spatial Planning, City Area

Abstrak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengisyaratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan harus mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, disusun secara berjenjang yang pada akhirnya rencana tata ruang tersebut ditetapkan dengan peraturan daerahnya masing-masing. Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode survey. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelian kuantitatif dan Deskriptif kualitatif. Sedangkan dari pendekatan kuantitatif dihasilkan dari persepsi masyarakat bahwa hasil penelitian yang ada, terdapat beragam sikap dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari dukungan penuh hingga ketidakpuasan. Berdasarkan rencana tata ruang terhadap Peta Rencana Kawasan Budidaya Kota Jayapura Tahun 2023-2033 terdapat 7 (Tujuh) Yakni Lahan Hutan Konversi, Kawasan Lindung, Kawasan Lahan Peternakan, kawasan Perikanan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Tanaman Pangan, dari hasil survey yang dilakukan oleh penulis di Lokasi penelitian telah terjadi perubahan di Kawasan lahan Hutan Konversi akibat dari adanya aktivitas pembangunan dan membuat berkurangnya luas lahan di Kawasan Budidaya yang awalnya memiliki luas 523.847 Ha, telah berkurang menjadi 523.790 atau 0,01%, dimana Perumahan yang memiliki Luas lebih besar yakni 13,665 Ha. Dan telah terjadi perubahan lahan juga pada Lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang awalnya memiliki luas 430,048 Ha, telah mengalami perubahan dan berkurang menjadi 121,027 Ha atau 14% , hal ini dikarenakan terdapat Lahan Pertanian yang memiliki luas 19,409 Ha di kawasan Lahan Hutan produksi Terbatas mengalami perubahan yang cukup besar.

Kata Kunci: Implementasi Peruntukan Lahan, Tata Ruang, Wilayah Kota

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengisyaratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan harus mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, disusun secara berjenjang yang

pada akhirnya rencana tata ruang tersebut ditetapkan dengan peraturan daerahnya masing-masing Kampung Holtekamp, yang terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, adalah daerah strategis dengan potensi ekonomi yang besar. Secara geografis, Holtekamp memiliki topografi yang beragam dengan daerah pesisir yang potensial untuk pengembangan pelabuhan dan kawasan wisata. Potensi geografis lainnya termasuk sumber daya alam seperti hutan dan perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati dari sisi demografi, populasi di Distrik Muara Tami terus meningkat dengan adanya migrasi penduduk dari daerah lain yang mencari peluang ekonomi di wilayah perbatasan. Kebijakan peruntukan lahan atau penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 8 Tahun 2013 sebagai Acuan Peta Rencana Tata Ruang. Penataan ruang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, dengan transparansi, akuntabilitas, demokratis, dan perlindungan hukum sebagai dasar utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Peruntukan Lahan di Holtekamp dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kampung Holtekamp, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. LANDASAN TEORI

Definisi Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan sebuah rencana, desain, ide, model, kebijakan, standar, atau spesifikasi dalam suatu sistem atau lingkungan nyata. implementasi adalah suatu proses politik dan administratif yang terintegrasi. kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan alih fungsi lahan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam upaya penataan serta pengaturan kecenderungan penggunaan lahan.

Teori Overlay

Teori overlay atau (*overlay theory*), adalah konsep yang dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti jaringan komputer, geografi, dan lain-lain teori overlay melibatkan penumpukan atau integrasi data dari berbagai sumber atau lapisan untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif Overlay dalam Sistem Informasi Geografis (GIS) adalah metode analisis spasial yang menggabungkan dua atau lebih layer lapisan data geografis untuk menghasilkan layer baru dengan informasi yang lebih kaya. Proses ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis hubungan spasial dan interaksi antara berbagai elemen geografis

Overlay sebagai proses mengkombinasikan dua atau lebih layer peta untuk menghasilkan layer baru yang mengandung informasi gabungan dari semua layer asli. Ini adalah teknik penting dalam analisis spasial yang memungkinkan penilaian kompleks dari berbagai faktor geografis.

Peruntukan Lahan

Peruntukan lahan atau penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 26 peruntukan lahan akan menentukan jenis bangunan yang boleh didirikan pada sebuah lokasi. Kebijakan Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 8 Tahun 2013 sebagai Acuan Peta Rencana Tata Ruang. Penataan ruang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, dengan transparansi, akuntabilitas, demokratis, dan perlindungan hukum sebagai dasar utamanya Peruntukan lahan yang tertata diharapkan mampu mewadahi seluruh kepentingan secara optimal dalam ruang itu sendiri, maupun dalam ruang daerah sebagai wadah kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Penutupan Lahan

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari 15 bentang alam dan/atau bentang buatan (UU No.4, 2011). Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010) dalam ilmu spasial terdapat dua istilah yang berhubungan dengan lahan, yaitu tutupan/penutupan lahan (land cover) dan penggunaan lahan (land use). Jika dilihat secara sekilas tutupan lahan dan penggunaan lahan mungkin terlihat sama saja seperti lahan pertanian, permukiman, hutan, dan sebagainya.

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di perkotaan dan pedesaan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kegiatan yang menjadi ciri kawasan pedesaan meliputi tempat permukiman pedesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Permukiman

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan.

Perekonomian

Perekonomian adalah sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara oleh karena itu identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya termasuk peran pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional.

Penataan Ruang

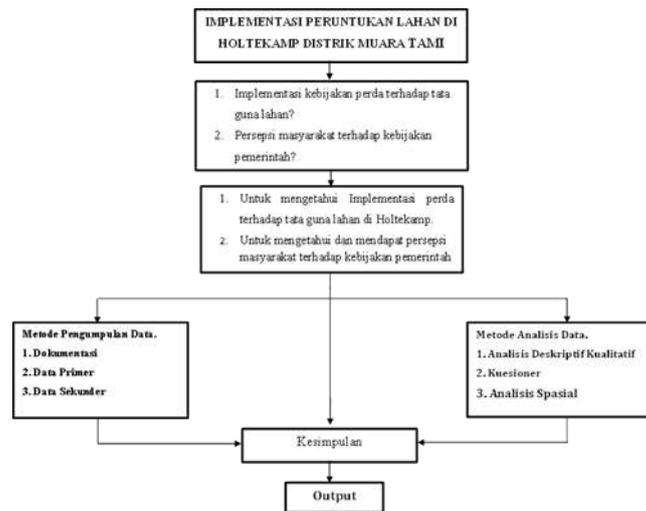
Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang disebutkan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Pasal 1 angka 2). Lebih rinci didefinisikan pula stuktur ruang dan pola ruang di dalam pasal 1, ketentuan umum. Stuktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Overlay

Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Pemahaman bahwa overlay peta (minimal 2 peta) harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Dalam bahasa teknis harus ada poligon yang terbentuk dari 2 peta yang di-overlay. Jika dilihat data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentuknya. Misalkan Peta Lereng dan Peta Curah Hujan, maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan

3. Metodologi Penelitian

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian



Gambar 2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang berfokus pada area Peruntukan Lahan dan Lokasi penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dibagi ke dalam dua bagian, yaitu berdasarkan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh dari dari RTRW, RDTR serta Kemenparekraf. Sedangkan data sekunder merupakan hasil peroleh data secara langsung dari sumber asli dengan cara mengunjungi instansi – instansi terkait daerah yang telah di tentukan. Sumber data yang di dapat yaitu wawancara dan observasi Teknik pengumpulan data primer merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menarik informasi Kuantitatif cara pengumpulan data sekunder yaitu untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi melalui media cetak atau media elektronik.

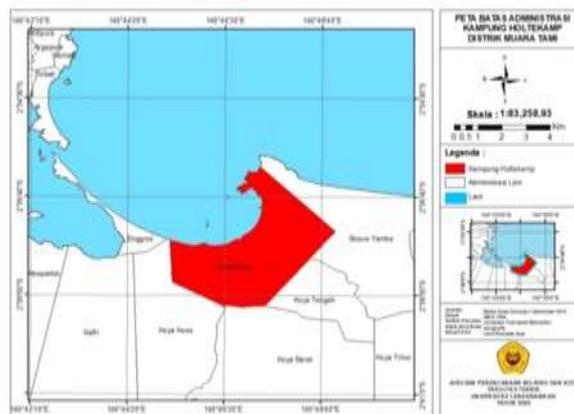
Gambaran Umum Wilayah

Sejarah Kampung Holtekamp

Kampung Holtekamp merupakan salah satu kampung di Distrik Muara Tami, Provinsi Papua, Indonesia. Kampung ini memiliki sejarah yang kaya dan penting bagi masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk di kampung ini bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau pekerja di sektor pertambangan. Selain itu, kampung ini juga memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang unik, yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat di sana sejarah kampung Holtekamp mungkin melibatkan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat seiring waktu.

Profil Kampung Holtekamp

Wilayah Kampung Holtekamp mencapai Luas 1.812 Ha. Kampung Holtekamp juga dikenal sebagai salah satu kampung model terbaik di Kota Jayapura Kampung Holtekamp merupakan salah satu kampung yang berada pada Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.



Gambar 3 Batas Administrasi Holtekamp

Iklm

Kampung Holtekamp, yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, memiliki iklim tropis yang ditandai oleh suhu yang hangat sepanjang tahun, curah hujan yang tinggi, dan kelembaban yang sangat tinggi dan mengalami curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata curah hujan tahunan sekitar 3000 mm. Intensitas Curah hujan bulanan dapat melebihi 300 mm pada puncaknya, terutama pada bulan Desember hingga Maret. Selama periode ini, hujan deras sering terjadi, biasanya disertai dengan badai petir, dan akibat atau dampak dari intensitas curah hujan yang tinggi pada bulan Desember hingga maret sering menyebabkan banjir di daerah rendah, dan aliran sungai yang deras dapat membawa material sedimen dari hulu Suhu Rata-rata Berkisar antara 24°C hingga 30°C Pada siang hari selama musim kemarau, suhu dapat mencapai 32°C hingga 34°C. Dan Pada malam hari,

terutama selama musim hujan, suhu jarang turun di bawah 22°C. Perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu signifikan, yang merupakan karakteristik umum dari iklim tropis.

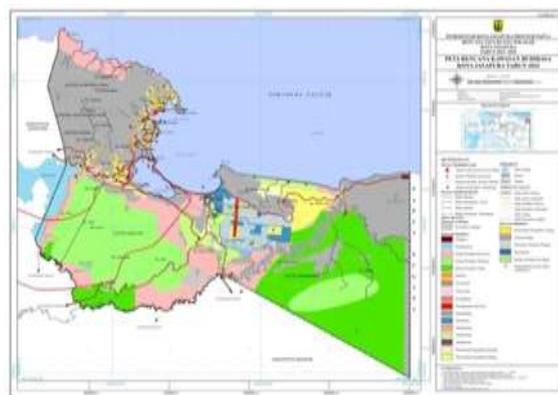
Kependudukan

Menurut data dari Badan Pusat Statistik penduduk (BPS), jumlah penduduk di kampung Holtekamp mencapai 748 jiwa, terdiri dari 378 laki-laki dan 370 perempuan, Selain itu, terdapat 188 Kepala Keluarga. menurut statistik dari sensus penduduk.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

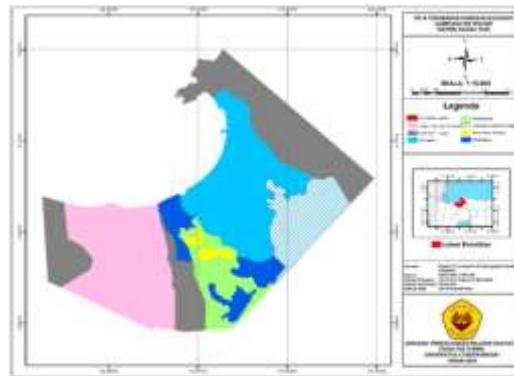
Lahan Kawasan Budidaya

Rencana kawasan budidaya peruntukan lahan di Holtekamp dapat melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan strategi pengelolaan lahan yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung ekonomi masyarakat lokal di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura berdasarkan Peta Rencana Kawasan Budidaya Kota Jayapura Tahun 2023-2033 terdapat beberapa lahan yang berada pada lokasi penelitian yakni Lahan Hutan Produksi Konvensional, Kawasan Lindung, Kawasan Lahan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Perumahan Kepadatan Rendah dan Lahan Pertanian Tanaman Pangan yang dapat dilihat pada Gambar 4 Peta Rencana Kawasan Budidaya Kota Jayapura Tahun 2023-2033.



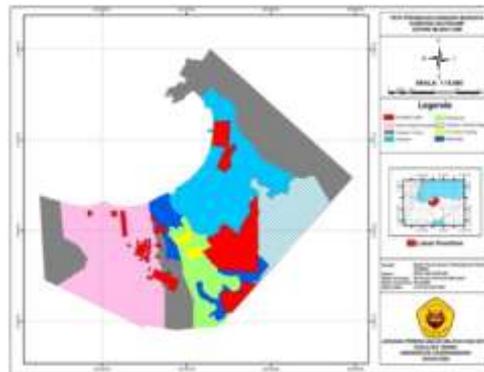
Gambar 4 Peta Kawasan Budidaya

Peta kawasan rencana budidaya Kota Jayapura Tahun 2033 yang digitasi dengan menggunakan software ArcGis dengan metode georeferensi. Peneliti mendigitasi ulang peta tersebut sesuai dengan lokasi penelitian yang berada pada kampung Holtekamp yang terdapat beberapa lahan yang dapat di lihat pada gambar 5.2 Peta Kawasan Rencana Budidaya Kampung Holtekamp .



Gambar 5. Peta Kawasan Budidaya di Kampung Holtekamp

Dari hasil pengamatan citra satellite dan survey di lokasi penelitian terdapat beberapa perubahan lahan yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut yakni perubahan lahan pada hutan Produksi Konvensioanal, hutan produksi terbatas, Kawasan Lahan pertanian Tanaman Pangan, Kawasan Lahan Hutan Lindung, Kawasan Lahan Perikanan dan Kawasan Lahan Peternakan yang dapat dilihat pada Gambar 5.3 Peta Perubahan Kawasan Budidaya Kampung Holtekamp sebagai berikut.



Gambar 6. Peta Perubahan Kawasan Budidaya Kampung Holtekamp

Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian terdapat beberapa perubahan lahan yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut terdapat 7 perubahan Lahan di kawasan Budidaya dengan mempunyai luas wilayah yakni perubahan lahan pada hutan Produksi Konvensioanal, hutan produksi terbatas, Kawasan Lahan pertanian Tanaman Pangan, Kawasan Lahan Hutan Lindung, Kawasan Lahan Perikanan dan Kawasan Lahan Peternakan bisa dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1 Kawasan Budida

No.	Keterangan	Luas Lahan	Hutan konversi	Hutan Konversi Sesudah Perubahan
1	Lahan Terbuka	6,441	430.070	430.048
2	Perdagangan dan Jasa	0,221		
3	Pendidikan	0,679		
4	Barang dan Jasa	0,268		
5	Perumahan	13,665		
6	Perkantoran (KPU)	0,950		
Total		22		0,01%

Adalah Kawasan Budidaya yang berubah jadi kawasan konvensional

Perubahan Kawasan Lahan Hutan Produksi Konversi

Berdasarkan Peta Perubahan Kawasan Lahan Hutan produksi Konversi terdapat beberapa lahan yang berada pada lokasi penelitian yakni Lahan Terbuka, perdagangan dan jasa, pendidikan, barang dan jasa, perdangan, perumahan dan perkantoran (KPU) yang dapat dilihat pada Gambar 7



Gambar 7 Peta Perubahan Kawasan Lahan Hutan produksi Konversi

Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian terdapat beberapa perubahan lahan yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut terdapat 7 (tujuh) perubahan Lahan di kawasan Lahan Hutan Produksi Konversi yakni Lahan Terbuka, perdagangan dan jasa, pendidikan, barang dan jasa, perdangan, perumahan dan perkantoran (KPU) dengan masing-masing lahan memiliki luasan persentase yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

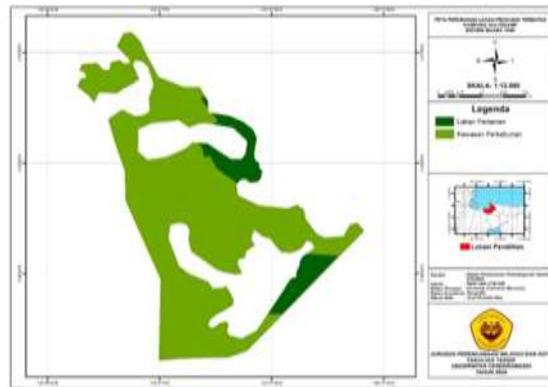
Tabel 2 Lahan Hutan Konversi

No.	Keterangan	Luas Lahan	Hutan konversi	Hutan Konversi Sesudah Perubahan
1	Lahan Terbuka	6,441	430.070	430.048
2	Perdagangan dan Jasa	0,221		
3	Pendidikan	0,679		
4	Barang dan Jasa	0,268		
5	Perumahan	13,665		
6	Perkantoran (KPU)	0,950		
Total		22		0,01%

Adalah Kawasan Budidaya yang berubah jadi kawasan konvensional

Perubahan Lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan ini biasanya dikelola secara berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan keberlanjutan lingkungan. hutan produksi terbatas, pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, serta kesejahteraan sosial Berdasarkan Peta Perubahan Kawasan Lahan Hutan Produksi Terbatas Terbatas memiliki luas 430,048 Ha terdapat beberapa lahan yang berada pada lokasi penelitian yakni Lahan Pertanian dan Kawasan Perkebunan yang dapat dilihat pada Gambar 8



Gambar 8 Peta Perubahan Kawasan Lahan Hutan Produksi Terbatas

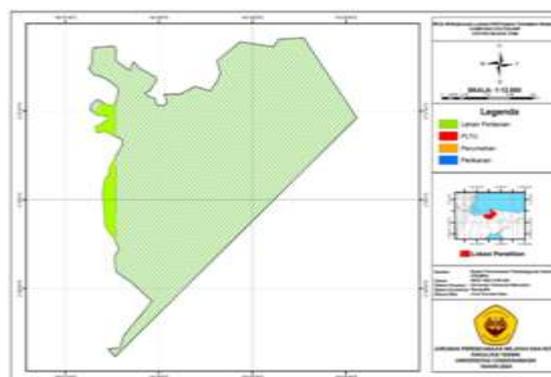
Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian terdapat beberapa perubahan lahan yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut terdapat 2 (dua) perubahan Lahan di kawasan Lahan Hutan Produksi Terbatas yakni Lahan Pertanian dan Kawasan Perkebunan memiliki luasan persentase yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3 Perubahan Kawasan Lahan Hutan Produksi Terbatas

No.	Keterangan	Luas Lahan	Awal Lahan	Perubahan Lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas
1	Lahan Pertanian	19,41	140,44	121,03
Total		19,409		14%

Perubahan Lahan Pertanian Pangan

Lahan Pertanian pangan yang dimaksud penulis adalah lahan pertanian yang berupa tanaman pangan yakni ; Padi, Jagung, Singkong, Petatas, Talas. Dengan luas sekitar 187,633 Ha, kini berubah menjadi 181,980 Ha. Perubahan ini terjadi akibat para petani mengganti jenis tanamannya menjadi tanaman pertanian berupa tanaman sayuran atau tanaman Pertanian, dapat dilihat pada gambar dan Gambar.9 dibawah ini.



Gambar 9 Perubahan Lahan Pertanian Pangan

Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian terdapat beberapa perubahan lahan yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut terdapat 1 (satu) perubahan Lahan di kawasan Pertanian Pangan yakni Lahan Pertanian memiliki luasan persentase yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4 Perubahan lahan Pertanian Pangan

No.	Keterangan	Luas Lahan	Awal Lahan Kawasan Tanaman Pangan	Perubahan Lahan Kawasan Tanaman Pangan
1	Lahan Pertanian	5,653	187,63	181,98
Total		5,653		3%

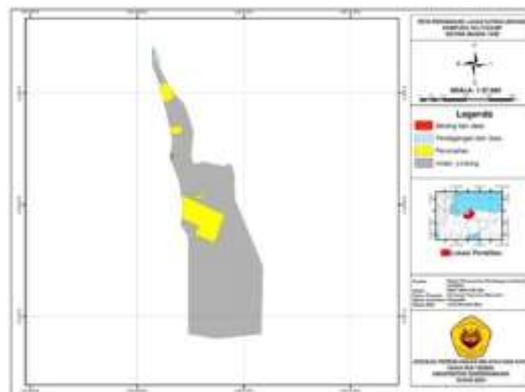
Berdasarkan Perubahan Lahan Kawasan Lindung

Sebelumnya Lahan Kawasan Perikanan memiliki luas wilayah 92,918 Ha. Kawasan ini yang seharusnya diperuntukan untuk Kawasan Lindung dan tidak boleh ada aktifitas maupun pembangunan di Kawasan ini, Namun dengan berjalannya waktu telah terjadi perubahan lahan dan pembangunan di Lahan Kawasan Hutan Lindung, dan membuat perubahan pada Lahan Kawasan Lindung mengalami perubahan lahan menjadi 83,038 Ha. Terdapat 3 (tiga) pembukaan lahan dengan masing-masing memiliki luas wilayah yang ada di dalam Lahan Kawasan Lindung, lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Kawasan Lindung

No.	Keterangan	Luas Lahan	Awal Lahan Kawasan	Perubahan Lahan Kawasan Lindung
1	Barang dan Jasa	0,084	92,918	92,908
2	Perumahan	9,88		
3	Perdagangan dan Jasa	0,364		
Total		10,33		0,01%
Adalah Kawasan Budidaya yang berubah jadi kawasan konvensional				

Berdasarkan Peta Perubahan Lahan Kawasan Lindung memiliki luas 92,918 Ha terdapat beberapa lahan yang berada pada lokasi penelitian yakni Barang dan jasa Perumahan Perdagangan dan Jasa yang dapat dilihat pada Gambar 10

**Gambar 10 Peta Perubahan Kawasan Lindung****Perubahan Lahan Kawasan Perikanan**

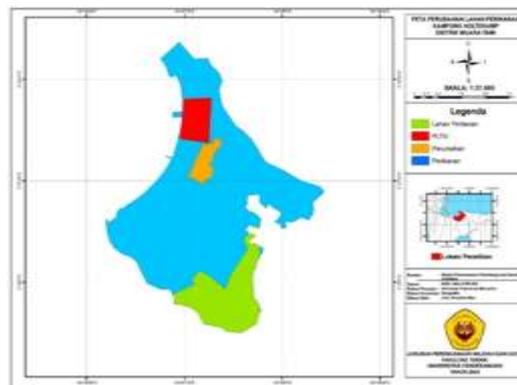
Sebelumnya Lahan Kawasan Perikanan memiliki luas wilayah 409189 Ha. Namun dengan berjalannya waktu telah terjadi perubahan lahan di Lahan Kawasan Perikanan telah terjadi perubahan pembangunan di kawasan dalam kawasan perikanan, dan membuat perubahan pada Lahan Kawasan Perikanan mengalami perubahan lahan menjadi 318,225 Ha.

Terdapat 3 (tiga) pembukaan lahan dengan masing-masing memiliki luas wilayah yang ada di dalam Lahan Kawasan Perikanan , lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Perubahan Kawasan Perikanan

No.	Keterangan	Luas Lahan ()	Awal Lahan Kawasan	Perubahan Lahan Kawasan Perikanan
1	Lahan Pertanian	61,31	409,19	318,23
2	Perumahan	11,06		
3	Perkantoran (PLTU)	18,60		
Total		91,0		22%
Adalah Kawasan Budidaya yang berubah jadi kawasan konvensional				

Berdasarkan Peta Perubahan Lahan Kawasan Perikanan memiliki luas 409,189 Ha terdapat beberapa lahan yang berada pada lokasi penelitian yakni Barang dan jasa Perumahan Perdagangan dan Jasa yang dapat dilihat pada Gambar 11



Gambar 11 Peta Perubahan Kawasan Perikanan

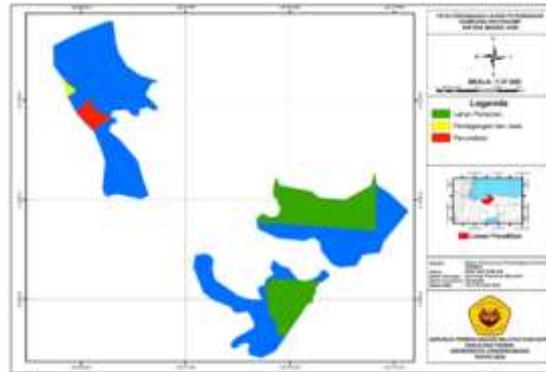
Perubahan Lahan Kawasan Peternakan

Sebelumnya Lahan Kawasan Peternakan memiliki luas wilayah 121765 Ha. Kawasan ini yang seharusnya diperuntukan untuk kegiatan perikanan, Namun dengan berjalannya waktu telah terjadi perubahan Lahan Kawasan Perikanan telah terjadi perubahan pembangunan di kawasan perikanan, dan membuat perubahan pada Lahan Kawasan Perikanan menjadi 121,758 Ha. Terdapat 3 (tiga) pembukaan lahan Pertanian yang memiliki luas wilayah yang ada di dalam Lahan Kawasan , lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Perubahan Lahan Kawasan Peternakan

No.	Keterangan	Luas Lahan	Awal Lahan Kawasan	Perubahan Lahan Kawasan Peternakan
1	Lahan Pertanian	6,441	121,77	114,42
2	Perumahan	0,221		
3	Perdagangan dan Jasa	0,679		
Total		7,341		6,03%
Adalah Kawasan Budidaya yang berubah jadi kawasan konvensional				

Berdasarkan pada Peta Perubahan Lahan Kawasan Peternakan memiliki luas 121,765 Ha terdapat beberapa lahan yang berada pada lokasi penelitian yakni Lahan Pertanian, Perumahan, Perdagangan dan Jasa yang dapat dilihat pada Gambar 12



Gambar 12 Peta Perubahan Lahan Peternakan

Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memegang peran penting dalam menentukan dukungan dan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, terdapat beragam sikap dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari dukungan penuh hingga ketidakpuasan.

1. Identitas/profil dasar masyarakat

Bagian pertama dari segmentasi data ini adalah Identitas atau Profil dasar masyarakat di kampung Holtekamp. Data identitas yang ditampilkan adalah data yang bersifat umum seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, status perkawinan dan suku. Untuk data spesifik seperti nama dan alamat dari Masyarakat tidak ditampilkan pada penampilan data karena tidak memiliki relasi yang begitu penting dalam segmen penampilan data. responden ini dipastikan jika jumlah responden yang ada dilokasi adalah mayoritas berjenis kelamin laki-laki (enam dari 10 responden).

KETERANGAN					
Jenis Kelamin				Status	
Laki-Laki	:	6	Lajang	:	3
Perempuan	:	4	Menikah	:	6
			Duda	:	0
Usia			OAP/ Non OAP		
Muda (22-25)	:	2	OAP	:	6
Produktif (27-41)	:	6	Non-OAP	:	4
Lanjut (42+)	:	2			
Pendidikan					
Tidak Sekolah +SD	:	2			
SMP	:	0			
SMA/K	:	7			
S1/D3/Sederajat	:	1			

2. Pengetahuan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Budidaya

Tingkat pengetahuan masyarakat di kampung Holtekamp adalah faktor utama yang menjadi tujuan evaluasi ini dilakukan. Pengetahuan masyarakat Tentang Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014. menjadi factor utama yang akan dievaluasi oleh penulis. Data yang akan disajikan adalah data asli berdasarkan hasil angket yang dikumpulkan penulis

dari masyarakat di lapangan. Beberapa data yang ditanyakan terkait Pengetahuan masyarakat terhadap Tentang Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014.

Tabel 8 Pengetahuan Masyarakat Terhadap PERDA Kota Jayapura No 1 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Budidaya

NO	MASYARAKAT LOKAL		LAMA MENEPATI (TAHUN)				PERDA RTRW NOMOR 1 TAHUN 2014	
	YA	TIDAK	1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 40	TAHU	TIDAK
1		1				1		1
2	1			1			1	
3		1	1					1
4	1					1		1
5	1					1		1
6	1					1		1
7		1	1					1
8		1	1					1
9	1					1	1	
10	1					1		1

3. Interpretasi Masyarakat Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014

Interpretasi Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 cukup bervariasi. Terutama disebabkan oleh faktor dimana tidak semua Masyarakat di Kampung Holtekamp tahu tentang Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014. Namun meski sebagian dari responden menyatakan tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014, namun melalui kuisisioner penulis juga memastikan kembali tentang pelaksanaan yang sudah berjalan saat ini.



Gambar 13 Gambar Diagram Pengetahuan Masyarakat Tentang RTRW Tahun 2014

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rencana tata ruang terhadap Peta Rencana Kawasan Budidaya Kota Jayapura Tahun 2023-2033 terdapat 7 (Tujuh) Yakni Lahan Hutan Konversi, Kawasan Lindung, Kawasan Lahan Peternakan, kawasan Perikanan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Tanaman Pangan, dari hasil survey yang dilakukan oleh penulis di Lokasi penelitian telah terjadi perubahan di Kawasan lahan Hutan Konversi akibat dari adanya aktivitas pembangunan dan membuat berkurangnya luas lahan di Kawasan Budidaya yang awalnya memiliki luas 523.847 Ha, telah berkurang menjadi 523.790 atau 0,01%, dimana Perumahan yang memiliki Luas lebih besar yakni 13,665 Ha. Dan telah terjadi perubahan lahan

juga pada Lahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang awalnya memiliki luas 430,048 Ha, telah mengalami perubahan dan berkurang menjadi 121,027 Ha atau 14% , hal ini dikarenakan terdapat Lahan Pertanian yang memiliki luas 19,409 Ha di kawasan Lahan Hutan produksi Terbatas mengalami perubahan yang cukup besar.

Saran

Implementasi peruntukan lahan yang tepat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan Masyarakat diharapkan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam forum-forum yang diadakan oleh pemerintah terkait kebijakan RTRW Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki kebijakan tersebut dan lebih termotivasi untuk mematuhi. Sering Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi RTRW dan tingkat pemahaman serta kepatuhan masyarakat Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan masyarakat Holtekamp akan lebih memahami dan mendukung kebijakan RTRW, serta pemerintah dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Desfilson, K., Musfira, & Normalia Ode Yanthy, D. (2022). Pengaruh peningkatan aktivitas pemanfaatan ruang. *Jurnal Spasial*, 12(1), 26–32.
- Dewi, K. P. (2019). Penentuan kualitas permukiman berdasarkan kriteria eco settlement di Kelurahan Sindulang Satu Kota M. *Jurnal Spasial*, 6(1), 169–177.
- Linda Cristi Corolina, C. S. (2011). Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 2(2), 224–229.
- Lisdiyono, H. (2004). Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan.
- Milano Khemal Sawo, Octavianus H. A. Rogi, & Ricky S. M. Lakat. (2021). Analisis pengembangan kawasan permukiman berdasarkan kemampuan lahan di Distrik Muara Tami. *Jurnal Spasial*, 8(3), 311–325.
- Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, & Gustaf Undap. (2018). Implementasi pembangunan infrastruktur desa dalam penggunaan dana desa tahun 2017. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; Or, why it's amazing that federal programs work at all*. University of California Press.
- Rosnila. (2004). Penggunaan lahan dari lahan pertanian dan lahan yang dibangun menjadi daerah perkotaan memerlukan perencanaan secara aktif.
- RTRW Kota Jayapura Tahun 2013–2033. Kawasan pengembangan kota didorong ke arah timur Kota Jayapura, yaitu Distrik Muara Tami.

- Syaukani, M. (2006). Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana.
- Trigus Eko, S. R. (2012). Perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap RDTR di wilayah peri-urban. *Biro Penerbit Planologi Undip*, 8(4), 331–340.